# LAMPIRAN

Lampiran 1 Verbatim Wawancara

Metode Wawancara : Tatap Muka

Waktu Wawancara : 22 Maret 2021, 13.40-14.00

**Profil Narasumber**

Nama : Henry Rosamirandha

Jabatan : Kasi PD KPPN Surabaya II

Usia : 50 tahun

Pendidikan terakhir : S2

Satuan Kerja : KPPN Surabaya II

**Keterangan**

P : Pewawancara

N : Narasumber

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dialog** |
| P  N  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N | **Pembuka**  Bisa kita mulai, Pak.. Selamat siang pak, jadi perkenalkan nama saya Shasza Yemima dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya mengambil tema KTTA berupa mata kuliah Pelaksanaan Belanja Negara dengan judul “Realisasi Anggaran Belanja Prioritas PEN pada Satker di Wilayah KPPN Surabaya 2”. Pada hari ini saya akan mewawancarai bapak selaku Kepala Seksi Pencairan Dana.  Seperti yang kita tahu pandemi Covid-19 itu merupakan suatu fenomena yang *extraordinary* gitu, Pak… Sehingga diperlukan peraturan yang bisa mengakomodir perubahan dari masa normal ke masa pandemi sekarang ini. Apakah ada perubahan peraturan dan kebijakan di masa pandemi ini yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran belanja?  Terima kasih ya, Shasza..  **Pelaksanaan anggaran pada masa pandemi Covid-19 ; Pengajuan SPM secara online melalui e-SPM**  Sebenarnya untuk peraturan mengenai penyampaian SPM pada masa pandemi kan sudah ada ya… Nanti kamu pelajari sendiri. Sebenarnya sama mekanisme pencairan dana APBN sebelum maupun saat pandemi Covid-19 sebenarnya sama.  Yang membedakan hanya cara penyampaian saja. Pada saat sebelum pandemi kan satker datang ya… sekarang kan tidak diperbolehkan, jadi kita sudah disiapkan aplikasi melalui e-SPM. Jadi satker dari kantornya atau dari mana saja bisa mengirimkan ke kami. Kami proses seperti biasa, seperti SOP SPAN biasanya. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Bedanya cara penyampaian saja.  Dari perbedaan itu apakah perubahan peraturan atau kebijakan tersebut itu jadi mempermudah satker atau ada kendala-kendala, Pak dari perubahan kebijakan tersebut?  Sebenarnya kendala tidak ada. Cuman kan kita perlu penyesuaian ya. Karena biasanya satker datang, sekarang tidak datang. Biasanya satker kalau datang kan SPM nya sedikit ya… Tapi karena dia tidak datang, SPM kan jadi banyak karena bisa mengirim sesuka dia. Jadi bisa saja jam 9 nanti kirim lalu jam 12 jam kirim lagi… Tapi kalau satker langsung datang dia kan sekali berangkat kesini, misal satu kali berangkat bawa 5 SPM atau kalau dia ke sini satu yang lainnya besok. Tapi karena dia berada di kantor atau di rumah, sesuka dia saja yang penting dokumennya lengkap.  Kalau dulu pada masa normal itu kenapa ya, Pak kok enggak dibikin online juga aja atau ada urgensi lain, kenapa satker itu harus menyampaikan SPM-nya secara tatap muka?  Pada waktu itu memang sudah ada e-SPM itu. Uji cobanya ada di KPPN Jakarta 2. Nah disana itu satu hari bisa 1000 SPM. Berhubung ada pandemi, mau tidak mau ya harus diterapkan di seluruh Indonesia. Kenyataannya memang kalau dilihat dari segi SPM ada peningkatan. Biasanya 100-200 SPM, bisa jadi 500. Ini semua karena kemudahan yang kita berikan kepada satker. Kalau dari sisi KPPN ya tidak masalah, yang penting aplikasinya sudah ada dan kita sudah siap memproses.  Kalau perbedaannya misalnya setelah adanya e-SPM ini kan satker tadi jadi bebas ya, Pak mau mengirim SPM kapan saja. Nah dengan kemudahan itu, apakah satker jadi seenaknya sendiri begitu, misal SPM yang diajukan kurang diperiksa atau kurang teliti?  Ada beberapa sebetulnya. Kalau kita memantau penolakan e-SPM, frekuensi penolakan SPM itu lebih banyak. Salah satu alasannya, memang karena satker kurang teliti dalam membuat SPM atau melampirkan dokumen pendukung. Jadi kasarannya, yang penting sudah buat SPM dan di tandatangani oleh atasannya, langsung dikirimkan. Kalau diterima ya syukur, kalau ditolak yang nggak papa. Itu sih salah satu kelemahan yang tidak bisa memantau sampai kesana.  Tapi pada saat dia datang ke sini kalau terjadi kesalahan kan dia kembali lagi, itu yang menyebabkan dia harus benar-benar dalam mengajukan SPM beserta lampiran dokumen pendukungnya. Tapi kalau dia di kantor, untuk ketelitian itu kurang. Dengan anggapan nanti kalau salah, bisa minta tanda tangan lagi, kalau ditolak akan dikembalikan dan bisa mengirimkan kembali.  Kalau ada kesalahan dan penolakan SPM nantinya akan mengurangi performa kita, padahal bukan sepenuhnya salah kami, tapi ya karena kesalahan mereka juga. Kami sudah sosialisasikan juga. Tidak semua satker seperti itu, tapi ada beberapa.  Apakah perubahan kebijakan dan peraturan tadi berupa pengajuan SPM secara online lewat aplikasi e-SPM itu apakah sudah di implementasikan dengan baik di KPPN Surabaya 2. Apakah masih ada satker yang suka bandel dan tetap datang datang ke sini?  Menurut pengamatan saya, penerapan e-SPM sudah cukup bagus, kita juga adaptasinya cepat dan mudah. Dengan layanan online, jadi meminimalisir bertemu dengan satker secara langsung sehingga mencegah KKN, itu yang pertama. Yang kedua meminimalisir kontak fisik secara langsung untuk mencegah penyebaran Covid-19.  Untuk penyampaian SPM sudah tidak ada satker yang datang langsung. Tetapi untuk konsultasi, misalnya terkait aplikasi itu masih ada beberapa satker yang datang ke sini, tapi dengan perjanjian… Nggak asal datang.  Kalau dulu sewaktu masih baru-barunya pergantian dari sebelumnya pengajuan SPM secara tatap muka dengan pengajuan SPM secara online melalui e-SPM itu, Bagimana sih cara mensosialisasikannya supaya semua satker mendapatkan informasi yang menyeluruh?  Pada saat pertama kali terjadi pandemi, kita memang praktik dulu mengenai e-SPM… Sambil berjalan, kita sosialisasikan ke satker bahwa penyampaian SPM itu melalui e-SPM. Kita juga ada sosialisasikan lewat zoom. Jadi kita sama-sama melangkah, kita juga belajar, kita juga menerima SPM, mereka juga kita beri sosialisasikan agar mereka dapat memantau posisi SPM mereka ada dimana, sudah kami proses atau belum, ditolak atau tidak.  **Pemisahan akun-akun belanja terkait penanganan pandemi Covid-19**  Nah selanjutnya saya mau lebih memperdalam, Pak ke dalam topiknya yaitu tentang belanja terkait dengan belanja penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kan membuat kebijakan pemisahan akun-akun belanja Covid-19 yang dimasukkan ke dalam 20 aku belanja baru. Kenapa sih, Pak dilakukan pemisahan itu? Kenapa kok nggak ikut aja akun yang lama kan sama-sama belanja barang dan belanja modal?  Itu penjelasannya begini, kenapa dibuat akun tersendiri? Supaya pemerintah itu memantaunya gampang dan mudah dari segi pengawasan dan pertanggungjawaban. Kalau dia akunnya sendiri-sendiri, kita tahu berapa sih yang terserap untuk Covid-19 ini. Nanti perlakuan akuntansinya bagaimana, nanti akan jelas dan terpisahkan. Kalau dilihat dari dua digit pertama akunnya kan sama, tapi kalau sudah 6 digit akan berbeda. Kita bisa tahu, berapa yang dialokasikan pemerintah dan berapa yang terserap, semua jadi jelas. Itu saja sih intinya kenapa kok dilakukan pemisahan akun, ya supaya transparan dan jelas dibedakan bahwa dana ini untuk Covid-19  Kalau implementasi nya sendiri tuh gimana sih, Pak? Seperti yang kita ketahui untuk alokasi belanja tahun 2020 lalu kan pasti sudah dibuat DIPA-nya dari tahun 2019. Sedangkan pemisahan akun baru dilakukan pada saat peraturan tersebut keluar di tahun 2020. Nah itu bagaimana, Pak?  Jadi kalau untuk penggunaan akun Covid itu memang pada awalnya kan campur antara keperluan penanganan Covid-19 dengan keperluan perkantoran sehari-hari. Dengan adanya pemisahan akun untuk Covid-19 itu, untuk pengeluaran APBN yang terjadi sebelum adanya akun ini diberi kesempatan untuk merevisi, disesuaikan akunnya dengan akun Covid-19 yang ada di Perdirjen. Setelah Perdirjen ini berlaku, maka untuk belanja berikutnya harus sudah menyesuaikan akun yang ada, yang 20 akun khusus Covid-19.  Itu yang pertama. Kalau memang sudah terjadi belanja, maka mengajukan revisi atau ralat SPM supaya bisa mengikuti akun Covid-19. Pada saat akun tersebut berlaku, maka untuk belanja selanjutnya maka harus menyesuaikan dengan akun Covid-19 yang diwajibkan, yang ada di Perdirjen itu.  Dari pemisahan 20 akun Covid-19, efek yang dirasakan satker berarti harus merevisi DIPA ya pak… Apakah revisi DIPA akan berpengaruh terhadap penyerapan belanjanya?  Oh.. tidak ada. Kalau untuk merevisi/meralat sudah kewajiban kita. Tinggal kecepatan satker dalam mengajukan revisi/ralat, kalau satker melakukan revisi/ralat dengan cepat maka tidak akan berpengaruh terhadap realisasi mereka.  Terkait 20 akun khusus Covid-19, belanja apa saja yang biasanya dialokasikan oleh satker ke dalam akun-akun tersebut?  Berdasarkan pengamatan SPM yang saya amati, biasanya belanja barang. Untuk belanja modal jarang sekali. Tapi ada beberapa satker misalnya dari Kementerian Kesehatan atau dari Kantor Pelabuhan dia mengalokasikan untuk belanja modal. Tapi untuk satker-satker seperti Kementerian Keuangan, Pertanian kebanyakan belanja barang  Kalau saya lihat waktu itu lewat laporan keuangannya, Pak… Itu ada 75 satker di wilayah KPPN Surabaya 2 yang mengalokasikan belanja Covid-19. Kenapa kok nggak semua satker aja punya apa alokasi untuk belanja Covid-19? Kenapa cuman 75 saja?  Ada kemungkinannya begini. Memang untuk ke-75 satker tersebut diberi kewenangan untuk menangani pandemi Covid-19 secara mandiri. Tapi ada juga satker-satker yang mendapatkan bantuan langsung dari kantor pusat... Jadi tidak terpaku di DIPA, bisa berupa Hibah uang maupun Hibah barang. Tapi saya rasa semua satker pasti ada anggaran penanganan Covid-19, cuman sumber dananya saja yang berbeda. Mungkin yang 75 satker diberi kewenangan melalui DIPA mereka masing-masing, tapi untuk sisanya bisa melalui hibah uang atau hibah barang, atau bantuan dari kementerian mereka masing-masing.  **Realisasi anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19**  Berapa persen penyerapan yang dianggap optimal untuk belanja Covid-19 dan apakah penyerapannya pada satker di wilayah KPPN Surabaya II sudah dapat dikatakan optimal?  Begini, karena belanja Covid-19 tadi kan merupakan belanja barang dan belanja modal, maka seharusnya realisasinya mengikuti realisasi target nasional misalnya untuk triwulan pertama kan 15% jadi belanja Covid-19 tuh harus mengikuti seperti itu. Karena dia mengikuti akun dua digitnya mereka, yaitu akun 52 dan 53.  Berarti yang 90% itu ya, Pak?  Ya…  Untuk satker-satker di KPPN Surabaya II yang mengalokasikan akun belanja Covid-19, apakah penyerapannya sudah mencapai 90% semua atau bagaimana ya, Pak?  Kalau saya perhatikan secara umum, terutama di laporan keuangan, rata-rata satker-satker di sini 90% (dilihat dari tingkat penyerapan belanja 2 digit). Ada beberapa satker yang diatas 90%, tapi rata-rata tingkat penyerapan pada akhir tahun itu 90-92%.  **Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19**  Kesuksesan atau optimalnya penyerapan belanja penanganan Covid-19 itu kira-kira bergantung pada apa ya, Pak?  Yang pertama kan sebenarnya tergantung pada perencanaan mereka. Yang kedua tergantung pada kecepatan satker dalam mengajukan SPM. Itu aja sebetulnya. Semakin cepat mereka merealisasikan sesuai dengan rencana mereka, maka pasti akan optimal. Tapi kalau mereka menunda-nunda, maka penyerapannya tidak akan optimal. Saya rasa kalau penyerapan disesuaikan dengan rencana mereka, pasti akan optimal. Tapi kebanyakan satker di KPPN Surabaya 2 sendiri sudah sesuai dengan rencana mereka, sehingga penyerapannya optimal antara 90-92% di akhir tahun.  **Langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan realisasi belanja**  Dari sisi KPPN Surabaya 2 sendiri tuh langkah apa sih, Pak yang bisa KPPN Surabaya 2 lakukan supaya penyerapan atau realisasi belanja dari satker-satker ini bisa optimal?  Yang pertama, kita harus memproses SPM yang diajukan oleh satker dengan cepat, sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, kita harus selalu sosialisasi, selalu mengadakan sosialisasi lewat zoom baik mengenai aplikasi, pengenalan akun, proses revisi, koreksi SPM. Nah itu yang sering kita sosialisasikan kepada mereka. Bisa sosialisasi lewat zoom atau pengumuman melalui media sosial. Itu saja mungkin langkah-langkah dari KPPN Surabaya II.  **Penutup**  Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.  Iya… sama-sama. Sukses ya. |

Metode Wawancara : Zoom Meeting

Waktu Wawancara : 25 Maret 2021, 10.00-10.20

**Profil Narasumber**

Nama : Elfi

Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Usia : 46 tahun

Pendidikan terakhir : S1

Satuan Kerja : Stasiun Meteorologi Maritim Perak II Surabaya

**Keterangan**

P : Pewawancara

N : Narasumber

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dialog** |
| P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N | **Pembuka**  Perkenalkan, Bu… Nama saya Shasza Yemima Puteri Atmodjo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Saat ini saya sedang menyusun karya tulis tugas akhir saya yang berjudul Tinjauan Realisasi Anggaran Belanja Prioritas PEN Pada Satker Di Wilayah KPPN Surabaya II. Salah satu alasan saya menjadikan satker Ibu ini sebagai narasumber karena saya mendapatkan informasi berupa Laporan Realisasi Anggaran terkait Belanja Penanganan Covid-19 pada satker Ibu yang realisasi anggaran hanya mencapai 41,23%. Nah kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan, persentase tersebut belum bisa dikatakan optimal. Untuk itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Elfi.  Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Bu secara singkat…  Nama saya Elfi sebagai Bendahara Stasiun Meteorologi Maritim Perak II Surabaya. Saya usianya 46 tahun, pendidikan terakhirnya S1.  Kalau di Stamet ini, boleh diceritakan sedikit nggak Bu tugas dan fungsi satkernya?  Kalo disini tusinya memberikan layanan meteorologi, ada tugasnya masing-masing (per bagian), kalau di TU kita mengurusi keuangan dan kepegawaian.  **Pelaksanaan anggaran pada masa pandemi Covid-19**  Sebagai Bendahara satker, adakah perbedaan mekanisme pelaksanaan anggaran yang Ibu rasakan selama masa pandemi Covid-19 ini bu?  Perbedaan pasti ada, Mbak… Dulu rapat kan kita bisa dilakukan secara offline, sekarang secara online. Sehingga dana yang sudah kita anggarkan sebelumnya tidak bisa terealisasikan.  **Pengajuan SPM secara online melalui e-SPM**  Kalau misalnya saat ini Bu, kan saya dapat informasi dari KPPN bahwa sekarang penyampaian SPM dilakukan secara online melalui e-SPM. Kalau menurut Ibu, apa kelebihan dan kendala penyampaian SPM secara online seperti saat ini, Bu?  Kalau kelebihannya banyak ya, kalau dari segi waktu, kita tidak perlu datang ke KPPN ya. (Kalau sekarang) tinggal kita kirim data-datanya, sudah langsung tau hasilnya, apakah benar atau revisi, langsung kelihatan disitu. Kekurangannya mungkin kalau pada saat itu ada gangguan internet atau jaringannya penuh. Nah itu…  **Pemisahan akun-akun belanja terkait penanganan pandemi Covid-19**  Lalu ada peraturan terkait dengan pemisahan belanja yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang dipisahkan ke dalam 20 akun khusus, menurut Ibu bagaimana dampak yang ditimbulkan atas perubahan akun tersebut?  Waktu itu kita memang agak kesulitan, kita harus merevisi POK dengan dana yang kita miliki itu. Nah kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita saat itu ke beberapa MAK yang memang diperlukan dan kita butuhkan untuk belanja penanganan pandemi Covid-19 tersebut. Tapi tidak semua kita revisi, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Terutama untuk belanja barang operasional dan belanja jasa.  Kalau output dari belanja-belanja penanganan Covid-19 tersebut seperti apa ya, Bu di Stasiun Meteorologi Maritim Perak II ini?  Belanja seperti masker, handsanitizer, sama disinfektan. Kalau yang belanja jasanya untuk mengadakan rapid test bagi pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas kalau memang dibutuhkan kalau pegawai mendesak perlu melakukan perjalanan dinas baru kita adakan rapid test.  Lalu untuk anggarannya, anggaran semulanya kan 0, lalu sekarang anggarannya sekitar 19 juta. Nah anggaran ini asalnya darimana ya, Bu? Apakah dari pergeseran anggaran atau dapat tambahan anggaran, Bu?  Kalau kita dari pergeseran anggaran, Mbak. Jadi nggak menambah jumlah DIPA. Jumlahnya tetap, nggak berubah. Kita cuman ganti akun saja.  Anggaran yang digeser itu berasal dari mata anggaran apa ya, Bu?  Kalau nggak salah yang bergeser dari anggaran belanja 521111, keperluan perkantoran.  **Realisasi anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19**  Lalu selanjutnya, kalau saya lihat dari Laporan Realisasi Anggarannya, persentase realisasi anggarannya itu masih tergolong rendah. Sedangkan menurut KPPN, tingkat penyerapan yang dapat dikatakan optimal itu sekitar 90%. Kalau dari satker ini sendiri kira-kira kenapa ya Bu, apa kendala yang dialami sehingga anggarannya belum terserap dengan optimal?  Kita itu kan memang revisi di pertengahan tahun, jadi rencana semula memang segitu ya anggarannya, lalu setelah direalisasikan ke bulan-bulan berikutnya ternyata tidak sebanyak yang direncanakan kebutuhannya. Kalau dari segi realisasinya memang belum optimal, tapi memang kebutuhannya saat itu hanya segitu, sehingga hanya segitu yang kami belanjakan.  Lalu untuk tahun ini, tahun 2021 ini kalau dari satker Ibu sendiri apakah masih ada alokasi anggaran belanja penanganan Covid-19 ini Bu?  Masih… Untuk belanja-belanja barang operasional dan jasa juga.  **Langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan realisasi belanja**  Kemudian langkah atau strategi apa ya Bu yang dilakukan oleh Stasiun Meteorologi Maritim Perak II agar anggaran belanja tahun ini bisa lebih optimal lagi realisasinya?  Di awal tahun kami sudah menyusun rencana untuk kebutuhan penanganan Covid-19 betul-betul sesuai dengan kebutuhan, jadi kedepannya juga kami realisasikan sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah kami susun. Dan juga kami melakukan monitoring, apakah yang telah kami lakukan sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki kedepannya. Untuk perencanaan dan monitoring lah utamanya.  **Penutup**  Baik, bu.. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya, Terima kasih atas kesediaan dan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.  Sama-sama, Mbak. Semoga sukses selalu. |

Metode Wawancara : Tatap muka

Waktu Wawancara : 23 Maret 2021, 08.45-09.15

**Profil Narasumber**

Nama : Yeni Haryati

Jabatan : Analis Keuangan

Usia : 41 tahun

Pendidikan terakhir : S1

**Keterangan**

P : Pewawancara

N : Narasumber

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dialog** |
| P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N | **Pembuka**  Perkenalkan, Bu… Nama saya Shasza Yemima Puteri Atmodjo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Saat ini saya sedang menyusun karya tulis tugas akhir saya yang berjudul Tinjauan Realisasi Anggaran Belanja Prioritas PEN Pada Satker Di Wilayah KPPN Surabaya II. Pada hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait realisasi belanja PEN, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19, Bu..  Oh iya… silakan  **Pelaksanaan anggaran pada masa pandemi Covid-19**  Kalau terkait mekanisme pelaksanaan anggaran pada masa pandemi Covid-19 di satker ini bagaimana ya, Bu mekanismenya?  PPSPM memverifikasi ulang, setelah itu baru kita sebagai pelaksana pembuat surat perintah membayar itu mengajukan SPM ke KPPN. Biasanya kan kalau ke KPPN, kita kan langsung ke sana nih… sekarang setelah adanya pandemi Covid-19 awalnya kita lewat email, sampai lama sekali responnya. Tapi nggak seberapa lama kemudian ada e-SPM, sekarang sudah lancar  Justru malah pelaksanaan anggaran pada pandemi Covid-19 itu mekanismenya sama saja sih… Kita tidak berubah, kita semua pengujian tetap, dokumen dan verifikasi tetap… Jadi kita tidak berdasarkan daring. Bagaimanapun kan itu proses pengadaan barang dan jasa, jadi ya tetap tidak ada perubahan. Justru di KPPN-nya yang berubah.  **Pengajuan SPM secara online melalui e-SPM**  Setelah pandemi ini kan semua berubah jadi mungkin yang awalnya tatap muka, jadi melalui email dan e-SPM. Apakah ada kendala terkait pengajuan SPM melalui email dan SPM ya, Bu?  Terus terang beda, ya. Kalau melalui email itu kan kita pasif ya kita tidak tau apakah SPM itu direspon atau tidak direspon, apakah itu dibaca atau tidak, apakah itu ada supporting document yang kurang… Kita pasif, sampai saya tidak tau, kenapa SPM saya tidak menjadi SP2D. Kita tanya apakah ada yang kurang, ternyata SPM nya terlewat. Tapi kalau lewat e-SPM, ketika kita upload, kita kan bisa memantau. Apakah itu sudah diperiksa, apakah itu ditolak, apakah sudah divalidasi, apakah sudah menjadi SP2D. Kita jadi enak bisa memantau.  Cuman kalau masa pandemi ini kan di keuangan itu saya merasa bekerja lebih keras, lebih capek ya. Maksudnya gini, kita kan nggak mungkin melakukan pembayaran itu tuh tidak berdasarkan data yang konkrit… kan nggak mungkin. Kalau semua pertemuan bisa pakai daring, tapi kalau kita sebagai pembayar kan tidak mungkin, masih tetep manual. BAST harus ada, barang harus sudah diterima kemudian berita acara pembayaran harus ada, fisik sudah diterima dan sesuai, kemudian setelah itu kita baru melakukan proses pembayaran.  Dulu itu kan kita langsung saat pembayaran, SPM dan supporting document dibawa ke KPPN, selesai. Tapi sekarang kita lewat e-SPM, kita harus scan, setelah scan kemudian dengan adanya edaran kepala KPPN, dokumen ini kan harus kita pending dulu nih, kita kumpulkan setiap bulan. Selain kita punya arsip SPM sendiri, kita harus memaintenance dan menjaga arsip yang kita kumpulkan ini. Setelah akhir bulan, kita tarik data di SPAN, setelah itu dokumen ini baru kita kirim lagi. Otomatis kita harus bekerja jadi berlipat ganda. Mungkin kalau di KPPN juga sama aja, harus download, harus ngeprint, setelah ngeprint mungkin harus menunggu dokumen asli.  Ya intinya itu di masa pandemi ini proses pencairan itu tetap sama tapi alurnya itu lebih panjang. Kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang bersifat principle. Tidak hanya karena sedang pandemi, yowes lah nggak ada dokumennya nggak papa. Nggak bisa seperti itu. Kita tetap manual untuk supporting documentnya. Jadi ya bagaimana mekanisme pelaksanaan anggaran itu masih sama, bagaimana implementasi penerapan anggaran pada masa sekarang ya tetap sesuai dengan peraturan.  Kan kalau kita di sini kan yang jadi trigger kan KPPN ya… kalau proses pencairan kita ikut apa kata KPPN… sekarang prosedurnya ganti email, kemarin diubah lagi emailnya harus email .go, dulu email pertama kali kita BTKLPPsurabaya@gmail.com itu awalnya boleh waktu masa transisi, setelah selesai masa transisi kemudian baru menggunakan email keuangan.go.id itu agak lama kemudian baru e-SPM ini.  **Pemisahan akun-akun belanja terkait penanganan pandemi Covid-19**  Lalu di masa pandemi ini kan dilakukan pemisahan akun-akun untuk belanja penanganan pandemi Covid-19, Bu.. Menurut ibu mengapa ya pemisahan ini dilakukan?  Kenapa dilakukan pemisahan akun ke dalam 20 akun khusus penanganan Covid-19… Ya harus dilakukan sih… Kalau di kita sekarang ini contohnya akun untuk pembelian barang, biasanya itu untuk membeli contohnya paling mudah aja itu adalah reagen untuk laboratorium. Apasih yang akan kita uji? Yang kita uji itu adalah ada limbah industri, limbah rumah tangga, udara, penyakit-penyakit yang menjadi tanggung jawab kita seperti kusta. Semuanya berkaitan dengan tupoksi kita yaitu pengendalian penyakit lingkungan, selain itu juga penyakit yang menjadi tupoksi kita seperti kecacingan, stunting. Sekarang dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kita menjadi lab rujukan. Kita ada salah satu lab namanya lab virologi, untuk menguji yang berkaitan dengan penyakit seperti flu burung. Nah sekarang Covid-19.  Covid-19 kan mencakup banyak hal. Pertama-tama Covid-19 ini kan tidak sedikit demi sedikit terjadi, tapi langsung banyak. Ibaratnya semua itu tertuju kesitu. Semua kegiatan seakan-akan terhenti. Sekarang biaya membeli reagen, biaya SDM, biaya perjalanannya, kalau itu semua tidak disendirikan, bagaimana kita bisa mengetahui outputnya? Kita mengecheck output Covid-19, tidak mungkin berdasarkan output kusta. Jadi harus dialihkan anggaran ini. Makannya kita harus menggeser anggaran, misal awalnya anggaran perjalanan dinas program kecacingan, dihabiskan untuk program Covid-19. Kita harus tracing, surveillance berbasis laboratorium. Tupoksi disini kan surveillance berbasis laboratorium.  Surveillance itu apa? Surveillance itu penelusuran, seperti tracking di lapangan, selain laboratoriumnya. Jadi ya harus dipisahkan… Akun perjalanan dinas, akun belanja barang . Yang paling signifikan di kita itu adalah akun pembelian barang terus akun belanja modal. Seperti pipet-pipet itu kan harganya di atas 1 juta kan. Kalau secara akuntansi yang masuk nilai kapitalisasi kan yang di atas 1 juta, bagaimanapun harus menggunakan akun 53. Itu yang harus dipisahkan. Dalam masa pandemi itu kan kebutuhannya banyak, sementara kalau kita tidak memisahkan dikira itu belanja normal, kenapa kok belanja normal nilainya segitu? Padahal kan ini pandemi. Ibaratnya itu hasil positif negatif sangat ditunggu. Karena bagaimanapun kalau hasil positif datangnya terlambat, orangnya sudah berkeliaran.  Jadi bagaimanapun akun itu harus diubah karena itu akan menentukan nilai outputnya. Mengapa dilakukan pemisahan akun untuk belanja Covid-19 karena berkaitan dengan output kita dengan pertanggungjawaban kita. Kita mengeluarkan uang, outputnya apa? Ada yang namanya capaian output… ada orang yang bilang kalau satu rupiah pun uang yang dikeluarkan dari DIPA itu kan harus ada outputnya.  Apakah mekanisme telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada? Dan bagaimana implementasi penerapan anggaran belanja pada masa pandemi Covid-19 di satuan kerja Ibu?  Ya pasti sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya akun belanja Covid-19, kita belum bisa melakukan revisi POK ke Kanwil karena BAS nya belum ada. Setelah BAS turun bulan Maret/April dan ada akun Covid-19, contohnya belanja perjalanan dinas akunnya ini, untuk pembelian barang akunnya ini, untuk belanja modal akunnya ini, belanja persedian…  Yang paling signifikan itu kita belanja barang persediaan… ini luar biasa. Tahun ini lebih luar biasa lagi. Kan tahun ini BNPB sudah dipisahkan anggarannya kan, kalau kemarin kita dibagi kadang dapat reagen dari BNPB juga kita belanja sendiri. Tahun ini kita pagunya 190 M untuk satker ini. Tahun lalu kita 46, biasanya hanya 23-27.  Bagaimana mekanisme dan implementasi dari pemisahan akun-akun tersebut?  Implementasi biasanya kita dengan revisi POK dan revisi DIPA. Sudah sesuai dengan BAS dan peraturan yang ada. Terus kita ke Kanwil juga… Untuk mekanisme ini, maksudnya proses di kita atau bagaimana?  Iya bu, maksudnya proses revisi dan pergeseran anggaran yang tadi sempat Ibu singgung… Lalu, apakah pagu terkait belanja Covid-19 ini sepenuhnya dari pergeseran anggaran atau ada dapat dari pusat juga bu?  Kita dapat dari BA BUN juga senilai 13 M.  Apakah dengan adanya pergeseran anggaran ini menyebabkan kegiatan yang digeser anggarannya menjadi terganggu?  Kalau terganggu ya tidak. Karena kalau ada pergeseran anggaran, ya pasti… Seperti yang saya bilang contohnya belanja perjalanan dinas dianggarkan 3 M kita hanya melakukan 500 juta. Terus biasanya untuk pembelian reagen lab lingkungan, kita geser untuk pembelian reagen Covid-19 . Itu pasti kalau pergeseran. Apakah kita dapat dana tambahan untuk penanganan Covid-19? Iya… kita dapat tambahan 13 M khusus Covid-19. Apakah ini mengganggu? Kata-katanya bukan mengganggu ya… Program dilakukan secara efisien dan lebih efektif. Contohnya lebih selektif… Harusnya yang memantau 5 orang, kita terjunkan 1 orang saja. Output tetap terlaksana tapi pelaksanaannya secara efisien dan efektif. Bagaimanapun kan kita juga harus menaati peraturan pemerintah, terkait PSBB, dilarang berkerumun, harus jaga jarak dan sebagainya.  Belanja apa saja yang dapat ditampung ke dalam akun-akun belanja Covid-19? Apakah ada kesulitan dalam pemisahan akun-akun belanja Covid-19?  Kalau kita membedakan belanja bahan dan belanja persediaan kan dilihat dari prosesnya, kalau belanja persedian barang kita taruh gudang dulu, barang di drop digudang dulu, mereka mencatat, menginventarisasi barang yang keluar masuk gudang. Kalau belanja bahan kan habis pakai, jadi tidak perlu masuk gudang. Kalau diterima dulu oleh panitia pengadaan itu harus, karena prosedurnya seperti itu. Tapi kalau belanja bahan yaitu tadi, tidak perlu masuk gudang.  **Realisasi anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19**  Kalau realisasi dari belanja penanganan Covid-19 di satker Ibu sendiri bagaimana ya, Bu?  Kalau dari persentase target, karena kita P2P, kita menerapkan target yang lebih tinggi dari Kemenkeu. Kalau di Kemenkeu standarnya 90%, kalau di kita sendiri targetnya 92% kalau nggak salah ya. Tapi kita UPT jadi lebih tinggi dari itu.  Dengan tingkat penyerapan yang tinggi ini, kalau menurut Ibu apakah pelaksanaan anggarannya bisa dikatakan optimal ya, Bu?  Kalau dari target persentase ya kita sudah optimal sekali. Karena waktu dilakukan rekon tripartid itu antara kita UPT, Kemenkes dan Kemenkeu itu, tentang limpahan dana Covid-19 dari BA BUN, dananya tidak boleh digunakan untuk hal-hal selain belanja penanganan Covid-19. Sebelum dapat limpahan dana, kita sudah menggeser anggaran A untuk belanja Covid-19, lalu setelah dapat limpahan dana dari BA BUN, anggaran belanja yang kita geser tadi ini nggak boleh digeser kembali ke anggaran semula. Contohnya dulu kita belanja Covid-19 itu kita geser dari anggaran penanganan kusta, nah sekarang ada tambahan dana untuk belanja Covid-19 mau kita geser lagi ke anggaran kusta, sudah tidak bisa.  Kalau optimal iya pasti optimal. Kita melakukan penyerapan yang optimal tapi nggak boleh *ngawur*. Maksudnya begini, awal tahun kan tidak banyak dilakukan kegiatan karena kita masih menunggu pencairan anggaran dan lain sebagainya. Sedangkan lab kami harus tetap mengolah dari pagi siang sore, ada 3 shift kerja. Jadi bulan-bulan November-Desember ini kita siasati dengan melakukan pembelian reagen. Banyak orang beranggapan kan jumlah kasus negative menurun karena lab tidak melakukan tracing, yaitu karena persediaan reagennya juga habis. Karena tidak melakukan pengujian jadi ya seolah-olah turun. Kalau kita berkomitmen untuk menyiasati hal-hal seperti itu, kita selalu siap sedia untuk amunisi yang sekiranya memang wajib ada dan wajib punya. Kalau bicara optimal, ya optimal sekali. Apalagi kalau di KPPN, pada bulan Desember kan efektifnya hanya setengah bulan kan… Sedang kan kami disini pontang panting untuk melakukan penyerapan. Karena kan kalau pengadaan harus kontrak dulu ya, sementara kita tidak bisa melakukan kontrak jauh-jauh hari karena kejadiannya mendadak seperti ini dan uangnya belum ada kan. Setelah uangnya turun, waktunya juga sudah terbatas sekali untuk melakukan penyerapan. Belum lagi kita harus melakukan lelang. Tidak semua vendor kan bisa memenuhi kebutuhan sesuai yang kita inginkan.  Belanja seperti apa yang ditampung di dalam akun-akun khusus Covid-19 tersebut ya Bu? Dan outputnya seperti apa kalau dari satker Ibu sendiri?  Kalau di kita belanja bahan habis pakai, belanja barang untuk persediaan seperti reagen yang disimpan digudang, belanja perjalanan dinas kita pakai untuk melakukan pengawasan ke dinas-dinas kesehatan. Belanja modal berkaitan dengan kebutuhan lab Covid-19. Sekarang di lab kan ada standarnya, peralatan-peralatan seperti apa yang harus ada di laboratorium itu untuk menunjang kinerja laboratorium juga.  **Langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan realisasi belanja**  Cara-cara seperti apa sih Bu yang dilakukan supaya penyerapan dan realisasi anggarannya bisa optimal?  Kalau kami ya tidak ada kiat-kiat khusus sih ya. Ya karena memang kebutuhannya seperti itu. Ibaratnya pandemi ini kan suatu kejadian yang tidak terplanning, tidak dirancang sebelumnya, sedangkan kami ini sebagai laboratoriumnya. Disini kami yang menguji. Kalau menguji Covid-19 itu kan satu paket kan ya. Proses pengambilan, proses unboxing, proses mix reagen, proses PCR. Ini kan satu serangkaian proses ya. Sedangkan ada yang namanya toolkit kan yang isi serangkaian proses tadi. Yaudah kita belikan saja itu, tidak macam-macam. Belanja digunakan untuk kebutuhan yang pasti-pasti aja.  Menurut saya ya dengan memenuhi kebutuhan pokok. Nggak usah *neko-neko.*Kalau di kita dengan pembelian toolkit Covid-19, dari peralatan sampai reagennya. Sudah. Yang pasti-pasti aja.  **Kendala pelaksanaan anggaran pada masa pandemi Covid-19**  Kalau terkait kendala-kendala nih Bu, apa kendala yang dialami saat melakukan pelaksanaan anggaran di masa pandemi Covid-19 ini bu?  Kalau terkait kendala saat pencairan dana itu kan cenderung administrative ya. Misal ada kurang-kurang supporting document, salah uraian, salah aku, tapi menurut saya tidak ada hubungannya dengan Covid-19 sih. Karena ada atau tidak ada Covid-19 ya hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Tahun lalu saya pernah mengalami retur SP2D terkait belanja Covid-19. Ceritanya gini, kan kita ada Vendor dari Jakarta, karena memang yang bisa menyanggupi kebutuhan ini hanya vendor-vendor besar ya, nah vendor ini menggunakan Bank Woori, saat kita proses ke KPPN, terjadi penolakan bahwa Banknya tidak ada, inaktif. Setelah kami konfirmasi ke vendor, ternyata rekeningnya aktif dan masih digunakan sehari-hari. Apakah ini karena proses transfer antar bank nya yang tidak bisa mencakup bank-bank seperti Bank Woori. Tapi menurut saya ya kan proses administrasi sama aja ya, mau saat Covid-19 atau bukan.  Kalau kendala saat masa transisi dulu mungkin Bu, kan awalnya pengajuan SPM dilakukan secara tatap muka, lalu berubah menjadi online, apakah ada kendala yang dialami Bu?  Dulu pas awal-awal itu masih pakai email dulu. Pencairannya tidak jelas karena kita tidak tahu statusnya bagaimana, waktu menunggu SPMnya menjadi SP2D, kita tidak tahu apakah SPM nya salah, atau kenapa belum terproses. Tidak ada statusnya. Tapi sekarang sudah tidak, sudah pakai e-SPM. Pernah kejadian ADK kontrak saya, di e-SPM sudah rilis tapi di SPAN belum tayang. Nah akhirnya saya fotokan lalu saya tanyakan ke CSO. Ini kenapa kok di e-SPM sudah rilis tapi di SPAN belum tayang? Nah kalau seperti itu kan kita enak kan bisa memantau. Saya rasa itu.  Kalau menurut saya sekarang kerjanya jadi lebih capek ya. Maksudnya gini, kalau dulu kita buat SPM, kita minta tanda tangan, ya proses internal kita lah. Meskipun dulu kita berangkat manual ke KPPN, kalau ada SPM salah ya ditolak. Kalau sekarang kita sudah buat SPM, kita scan, tetep minta tanda tangan dan proses internal lain. Setelah itu kita pantau di e-SPM ini, ada statusnya, diperiksa ADK, dirilis, terbit SP2D. Kemudian kita harus memisahkan kan arsip untuk satker ini dengan untuk KPPN. Sekarang hardcopy SPM dan supporting document disampaikannya sebulan sekali ke KPPN. Akhirnya kita harus menyisihkan dan mengarsipkan dokumen KPPN, harus kita maintenance juga. Itu kan kelihatannya sepele tapi juga menambah workload kita. Dengan e-SPM ini sebenarnya semuanya jadi lebih mudah. Cuman jam pelayanannya saja. Awalnya pelayananya dari jam 07.30 s.d 17.00, jadi kita enak setelah kita buat SPM, tinggal di upload-upload saja dan menunggu kabar dari KPPN. Kemudian ada pemberitahuan perubahan jadwal jadi jam 08.00 s.d jam 15.00. Nah, misalnya kita sudah upload jam 09.00, lalu misalnya agak molor jadi SPM diperiksa jam 13.00, terus ada pemberitahuan ditolak jam 14.00, nah kita kan harus memperbaiki nih. Tapi waktunya sudah habis, ya besok lagi. Kalau waktunya sudah habis begitu kan kita sudah pasif. Makannya kita alurnya itu SPM harus selesai semua hari itu, sampai kita lembur. Nah pagi-pagi itu saya harus sudah submit, kalau-kalau ada yang salah nanti supaya bisa diperbaiki di hari yang sama. Kalau jam 17.00 lebih enak dan efektif ya kalau menurut saya, jadi lebih ada kelonggaran waktu. Kalau jam 15.00 itu kurang enak ya. Contohnya gini, kita yang paling urgent itu belanja perjalanan dinas. Butuh uang muka perjadin untuk besok atau besoknya, pergi selama satu atau dua hari. Kan kita gak punya uang kan, jadi harus minta uang ke KPPN. Nah ketika kita buat SPM, melihat jam sudah pukul 14.00. Sudah kita buat SPM, lalu mencari tanda tangan pimpinan, sudah selesai, mau diupload waktunya habis. Kalau waktunya sampai jam 17.00 kan masih bisa ya diupload, walaupun SP2D nya besok.  **Penutup**  Oh iya, mungkin sudah cukup bu. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.  Sama-sama ya. |

Metode Wawancara : Tatap Muka

Waktu Wawancara : 25 Maret 2021, 13.00-13.20

**Profil Narasumber**

Nama : Sardono

Jabatan : Kepala Bidang Keuangan

Usia : 52 tahun

Pendidikan terakhir : S1

Satuan Kerja : Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya

**Keterangan**

P : Pewawancara

N : Narasumber

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dialog** |
| P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N  P  N | **Pembuka**  Perkenalkan pak saya Shasza Yemima dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Maksud kedatangan saya kemari, saya ingin mewawancarai bapak seputar belanja penanganan Covid-19 di RS Bhayangkara ini pak…  Sebelumnya, bolehkah bapak secara singkat memperkenalkan diri dulu, pak?  Saya Sardono sebagai Koorkeu, Kepala Keuangan di Rumah Sakit. Saya disini juga baru sih, baru dua bulan karena yang sebelumnya meninggal karena Covid-19. Jadi saya diberi amanah untuk membantu teman-teman keuangan disini… Lalu ini tanya jawabnya bagaimana ini?  Iya pak seperti tanya jawab saja seperti biasa. Saya izin merekam pembicaraan kita pada hari ini ya pak, untuk dibuat menjadi transkrip wawancara.  Iya silakan.  **Pelaksanaan anggaran pada masa pandemi Covid-19**  Sebelumnya saya ingin bertanya pak, mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran di satker ini, apakah ada perbedaan ya pak dari dulu waktu normal dengan sekarang waktu Covid-19 seperti saat ini?  Kalau pelaksanaannya sih tidak ada yang berubah ya. Mungkin lebih terkait akunnya saja ada akun khusus untuk penanganan Covid-19. Kalau mekanisme pelaksanaannya ya sama.  **Pengajuan SPM secara online melalui e-SPM**  Saya dapat info dari KPPN pak sebelumnya, kalau dulu pengajuan SPM dilakukan secara offline, jadi satker datang langsung ke KPPN. Namun di masa pandemi seperti sekarang pengajuan SPM jadi online melalui e-SPM ya pak…  Kalau boleh tau kemudahan atau kendala seperti apa yang dialami satker ya pak, saat diterapkannya e-SPM ini?  Sebetulnya ada dua sisi sih, kemudahan dan kendala. Kalau dari satu sisi dipermudah karena kita tidak perlu pergi ke KPPN, jadi tidak makan waktu. Kita tinggal telpon, WA, kirim email. Nah itu kemudahannya. Kalau kendalanya, pada saat kami kesulitan masalah aplikasi, terutama aplikasi SAS, saat kami mau mengirim, ada trouble di aplikasinya, kalau by phone atau lewat WA kan berbeda ya dengan saat tatap muka. Kadang-kadang mencerna kata-kata dan tulisan lewat WA kan susah ya… Itu sih kelemahannya.  **Pemisahan akun-akun belanja terkait penanganan pandemi Covid-19**  RS Bhayangkara kan BLU ya pak, lalu untuk anggaran Covid-19 ini apakah dari PNBP atau dari RM atau bagaimana ya pak? Maksudnya apakah anggaran Covid-19 ini berasal dari pergeseran anggaran atau dapat tambahan dari RM, pak? Karena kan disini semula anggarannya 0.  Untuk anggaran Covid-19 ini, untuk yang RM ini dilakukan pergeseran. Jadi dari anggaran belanja barang biasa RM, digeser ke anggaran penanganan Covid-19. Kalau yang BLU, kita revisi penambahan, terutama penambahan yang dari Kemenkes. Jadi DIPA nya bertambah. Kalau anggaran BLU kan fleksibel ya karena dikelola sendiri.  Kalau dana yang bersumber dari RM tadi pak, yang dilakukan pergeseran belanja barang seperti apa ya, pak?  Sama, di akun belanja barang. Untuk Covid-19 nya kan belanja barang, nah pergeserannya juga dari akun belanja barang biasa.  Lalu, output dari belanja penanganan Covid-19 ini sendiri, kalau di RS Bhayangkara seperti apa ya, pak?  Untuk beli hand sanitizer, disinfektan, selain itu untuk membeli peralatan kesehatan, vitamin, obat.  **Realisasi anggaran belanja penanganan pandemi Covid-19**  Kalau kita lihat dari LRA nya kan penyerapannya sudah optimal nih pak, sudah 90% ke atas. Strategi-strategi seperti apa sih pak yang dilakukan oleh RS Bhayangkara sehingga penyerapan anggarannya bisa optimal seperti itu?  Karena memang kebutuhan dengan yang kita belanjakan itu seimbang, sesuai, pas. Karena bisa dikatakan kalau rumah sakit kan kita tidak bisa memprediksi ya berapa jumlah pasiennya, jadi kita belanjakan sesuai kebutuhan aja sih. Karena kita ini kan ditarget juga ya… Alhamdulillah tercapai.  **Kendala pelaksanaan anggaran belanja pada masa pandemi Covid-19**  Terkait penyerapan dan realisasi belanja Covid-19 ini, ada kah kendala yang dirasakan oleh RS Bhayangkara sebagai satker, pak?  Kalau bidang keuangan kan kita lebih ke administrasinya ya, jadi kalau kendala di lapangan saya kurang tau. Tapi kalau terkait dengan pencairan dananya, kita jalankan sesuai perintah yang kami terima, jadi ya nggak ada sih. Karena dari masing-masing bagian itu sudah tau aturan-aturan dan perlakuan masing-masing belanja. Palingan kendala di kami terkait dengan permintaan tanda tangan, karena kebutuhan mendesak, sementara pimpinan tidak ada. Tapi saya tetap harus mencairkan anggaran, padahal kan tidak boleh seharusnya. Pimpinan harus tau dulu.  **Penutup**  Oh begitu ya pak… Baik, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk membagikan ilmu dan informasinya.  Sama-sama. |